



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Jumat

Tanggal: 09 Oktober 2020

Halaman: 1

**Aksi Tolak UU Cipta Kerja
Merebak
Disayangkan,
Unjukrasa di DPRD DIY Rusuh**
***Sekwan Prediksi Kerugian Capai Rp 100 Juta**

YOGYA (KR) - Aksi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang berlangsung di Gedung DPRD DIY berakhir ricuh, Kamis (8/10). Massa merusak sejumlah fasilitas milik DPRD DIY, termasuk kendaraan operasional milik aparat kepolisian. Perusakan yang berakhir dengan pembakaran sebuah kafe di dekat Gedung DPRD DIY, sangat disayangkan.

Di Jakarta, aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja, kemarin juga memanaskan dan sempat menghentikan seluruh layanan transportasi Transjakarta. Pemantauan di lapangan, unjukrasa terlihat semakin memekam. Kericuhan pun tak terhindarkan lagi antara peserta aksi dengan aparat kepolisian.

Pos polisi di kawasan Patung Kuda Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat dibakar saat pendemo bentrok dengan polisi. Massa melakukan perlawanan dengan melemparkan batu ke arah aparat untuk membalas tembakan gas air mata.

Berdasarkan pantauan wartawan KR, massa tiba di DPRD DIY pukul 11.00 WIB, terdiri gabungan aliansi buruh. Aksi berlang-

sung damai dan sempat ditemui beberapa wakil rakyat, termasuk Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana ST.

Sekitar pukul 12.30 datang massa lain yang menyerukan tuntutan serupa. Mereka juga sempat melakukan orasi. Namun, tak

berselang lama diikuti pe- lemparan batu ke arah Gedung DPRD DIY. Aksi pun kemudian cenderung

* Bersambung hal 7 kol 1

Disayangkan,

Sambungan hal 1

anarkis dan tak terkendali. Sampai akhirnya polisi menembakkan gas air mata ke arah massa. Namun, mereka bukannya mereda, melainkan makin kalap dan anarkis.

Tak hanya melempar batu, massa juga merusak sejumlah fasilitas umum yang ada di lingkungan DPRD DIY. Dua unit kendaraan roda dua milik polisi yang berada di luar gedung dibakar. Sedangkan, empat unit yang di dalam Gedung DPRD DIY dirusak, termasuk delapan kendaraan operasional.

Massa yang berada di area Gedung DPRD DIY lalu dihalau aparat ke arah Malioboro, baik ke selatan maupun ke utara. Namun, justru mereka leluasa melakukan tindakan anarkis. Sebuah kafe yang berada di dekat DPRD DIY tidak luput dari amukan massa. Mereka membakar hingga akhirnya petugas mendatangkan pemadam kebakaran. Sejumlah fasilitas milik pedagang kaki lima juga rusak.

Peserta aksi kemudian memasuki lahan kosong bekas Kantor Dinas Pariwisata (Dispar) DIY, lalu menggunakan sisa reruntuhan bangunan untuk dilemparkan ke arah Gedung DPRD DIY. Mereka cenderung brutal dan anarkis dengan memecah kaca, melakukan corat-coret di kompleks DPRD, sehingga polisi dan TNI dikerahkan untuk meredam dan menertibkan keadaan.

Kondisi ini membuat prihatin Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana yang sempat menemui massa. Menurutnya, aksi massa ini justru mengaburkan tujuan utama, yakni penolakan UU Cipta Kerja. "Ini tidak mencerminkan karakteristik warga Yogya. Pasti, ada penyusupnya," tegasnya.

Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Purwadi Wahyu Anggoro menyatakan, massa perusuh yang beringsid

DPRD DIY belum teridentifikasi. Menurut Kombes Purwadi, terdapat tiga gelombang aksi. Pertama, massa buruh sekitar pukul 10.00 dan yang terakhir massa mahasiswa sekitar pukul 14.00 WIB. Massa yang disusupi perusuh adalah aksi gelombang kedua yang datang sekitar pukul 12.30 WIB.

Kapolresta menegaskan, pihaknya bersama TNI dan Pimpinan DPRD DIY sudah bersikap persuasif, mengajak komunikasi, namun massa memang sudah berniat anarkis, bukan menyampaikan aspirasi. "Kami persuasif, tapi mereka merusak. Tidak tahu tujuannya apa," ujarnya.

Sekretaris DPRD DIY Haryanta SH menaksir kerugian akibat kerusakan fasilitas DPRD DIY mencapai Rp 100 juta lebih. Banyak kaca ruangan dan genteng pecah, sementara pos keamanan dan pintu gerbang rusak, saluran air putus dan alat mscb listrik rusak.

"Mulai Jumat (9/10) akan kami lakukan pembersihan, sehingga gedung Dewan ditutup, dan dibuka kembali Senin (12/10)," katanya.

Di Kota Tegal, ribuan mahasiswa, pelajar dan buruh menggelar aksi demo di DPRD setempat, terjadi kerusuhan hingga seorang anggota polisi terluka akibat terkena lemparan batu. Hingga petang, massa masih menduduki Gedung DPRD Kota Tegal sembari membakar ban bekas.

Kapolresta Tegal, AKBP Rita Wulandari mengimbau agar penyampaian aspirasi dilaksanakan dengan tertib dan memperhatikan protokol kesehatan serta jangan anarkis.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendesak pemerintah segera melakukan sosialisasi isi dari UU Cipta Kerja secara detail. Caranya, dengan melibatkan Kominfo, Kemenaker, BUMN dan lainnya. "Jelaskan, hak-

hak mereka tidak hilang," katanya usai sosialisasi Empat Pilar MPR di gedung Partai Golkar Banjarnegara, kemarin.

Bambang mengatakan, kini tersebar hoaks tentang UU Cipta Kerja seperti hilangnya hak cuti, hak libur atau hak upah minimum kabupaten/kota. "Padahal, itu semua ada. Hanya memang disesuaikan dengan kondisi setempat dan inflasi. Keputusan ada di gubernur dan kepala daerah setempat," ujar Bambang.

Komis Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta aparat kepolisian tetap menghormati dan mengedepankan HAM dalam mengamankan unjukrasa penolakan UU Cipta Kerja. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, aparat kepolisian sebagai penegak hukum dalam menghadapi situasi seperti ini tetap menjaga koridor HAM menghormati kemerdekaan berpendapat.

Komnas HAM menyayangkan terjadinya perusakan fasilitas umum oleh demonstran di beberapa kota. Namun, mengingatkan kepolisian untuk tetap menghormati kebebasan berpendapat dan berekspresi setiap anggota masyarakat tanpa diskriminasi.

"Dalam melakukan pengamanan aksi penyampaian pendapat dan ekspresi, kepolisian agar melakukannya secara proporsional, berimbang dan sesuai keperluan, dengan mendahulukan negosiasi dan dialog. Selain itu, para pengunjukrasa juga diimbau agar menyampaikan aspirasi dengan simpatik, tertib, damai serta menjauhi tindakan kekerasan dan perusakan perusakan fasilitas umum maupun barang orang lain," pesan Ahmad Taufan.

(Awh/Bro/Ati/Ryd/Mad/Ful/Fxh) -d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005